



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1. RADAR BANTEN	4. SATELIT NEWS	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2. BANTEN POS	5. BANTEN RAYA	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3. KABAR BANTEN ✓	6.	MARET	JULI	NOVEMBER	
		23 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Temuan BPK

Dana BOS Rp 1,1 Miliar Bermasalah

SERANG, (KB).-

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten diduga bermasalah. Hal itu menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Dalam temuan itu pengelolaan dana BOS sebesar Rp 1.161.532.703,00 dinilai tidak sesuai ketentuan.

Persoalan itu juga menjadi sorotan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada. Menurut dia, temuan ketidaksesuaian penggunaan dana BOS sebesar Rp 1.161.532.703,00 bukan angka yang kecil. "Dana BOS sebesar itu bukan angka yang kecil," katanya kepada **Kabar Banten** pada Senin (22/4/2024).

Sebab itu, menurut dia,

“ Kita tidak boleh menganggap sepele soal pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan itu.

Uday Suhada

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik

temuan BPK atas ketidaksesuaian penggunaan pengelolaan dana BOS di Lingkungan Dindikbud Provinsi Banten tersebut harus ditindaklanjuti. "Hasil audit BPK itu tentu harus ditindaklanjuti," ujarnya berharap ada tindak lanjutnya.

Ia menuturkan, persoalan dana BOS jangan sampai dianggap biasa saja. Sebab hal tersebut, menurut dia, berkaitan langsung dengan kelanjutan kualitas dunia pendidikan di wilayah Provinsi Banten itu

Bersambung ke halaman 11



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i>	4.	<i>SATELIT NEWS</i>	JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2024
2.	<i>BANTEN POS</i>	5.	<i>BANTEN RAYA</i>	FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
3.	<i>KABAR BANTEN</i> ✓	6.		MARET	JULI	NOVEMBER	
				23 APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

● Dana BOS (Sambungan dari halaman 1)

sendiri. "Kita tidak boleh menganggap sepele soal pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan itu," ucapnya.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan tindakan hukum atas temuan dana BOS itu. "Saya kira para pihak tidak boleh berpangku tangan. Harus ditelisik, di mana letak persoalannya. Jika ada dugaan tipikor, tentu aparat penegak hukum harus turun tangan," tuturnya.

Pada prinsipnya, menurut dia, dana BOS harus diselamatkan demi kebaikan generasi penerus bangsa yang harusnya

menjadi subjek pembangunan. Kasus tersebut, menurut dia, bisa menjadi sumber penderita bagi dunia pendidikan.

"Prinsipnya, uang rakyat harus diselamatkan. Kasihan anak-anak bangsa, yang semestinya menjadi subjek pembangunan, malah jadi objek penderita," katanya.

Persoalan dana BOS itu juga sempat dikonfirmasi **Kabar Banten** ke Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, usai rapat inflasi di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug Kota Serang,

Senin (22/4/2024). Namun, Usman sepertinya enggan berkomentar banyak.

"Mau ke bandara," ujarnya sambil jalan kencang menuju mobil dinasny saat diminta pandangan soal temuan dana BOS.

Saat ditanya kembali oleh **Kabar Banten**, Usman juga irit bicara. Ia hanya berkata sudah dikoordinasikan. "Sudah dikoordinasikan ya," ucapnya sambil terus berjalan.

Namun saat ditanya koordinasi dengan siapa, Usman lebih memilih bungkam dan masuk ke mobil dinasny. (**Irfan Muntaha**)***